



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Majapahit Telp. (0370) 632012 – 623357 Fax. (0370) 632012 Mataram

Mataram, 05 Oktober 2017

Nomor : 560 / 1781 / 04-NAKERTRANS/X/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Tambahan materi pengumuman pendaftaran penerimaan seleksi calon hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial.-

Kepada
Yth 1. Ketua DPP Apindo Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Ketua DPD Serikat Pekerja/ Serikat Buruh se NTB (SPSI, SPN, SARBUMUSI, SBSI, SBJATRA, ASOKADIRA, dan yang sejenis)

di -

TEMPAT

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Melengkapi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 560/1771/04-Nakertrans/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 Hal Pengumuman proses seleksi calon hakim Ad - Hoc Hubungan Industrial, yang telah di sampaikan kepada Saudara melalui WA tanggal 04 Oktober 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor: 658/PHIJSK/I X/ 2017 tanggal 29 September 2017, tentang: Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad - Hoc Pengadilan Hubungan Industrial, yang kami terima tanggal 05 Oktober 2017 pukul 10.00 Wita, maka untuk melengkapi materi pengumuman surat Kepala Dinas tersebut diatas, bersama ini terlampir disampaikan pengumuman tambahan / lanjutan untuk bahan pelengkap seleksi administrasi;
2. Diharap kerjasamanya menginformasikan ulang kepada anggota masing - masing untuk mengajukan lemaran pendaftaran calon hakim Ad-Hoc dimaksud kepada Menteri Ketenagakerjaan RI melalui Disnakertrans Provinsi NTB atau sesuai ketentuan poin 1 diatas;

3. Informasi lebih lanjut dan teknis dapat menghubungi/kontak person dengan panitia penyelenggara Cq. Bidang PHI dan Jamsos Lt. II, melalui HP. 0819 0704 5520 (Kasi PPPHI), 0819 1608 2876 (Syamsudduha), 0812 1354 7632 (Mariatun Kiptiah,SH), 0819 0715 3344 (Gusti Agus Bambang S. SE);

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.-

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSABARAT



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Gubernur NTB (sebagai laporan) di Mataram;
2. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI di Jakarta;
3. Patinggal.-

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN PENERIMAAN SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
TAHUN 2017

Panitia Seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 264 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 mengundang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk mengusulkan anggota terbaik menjadi Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Persyaratan:

1. warga negara Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
5. berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S.1);
8. berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun yang dapat terdiri dari:
 - a. pengalaman penyelesaian perselisihan hubungan industrial (bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase);
 - b. kuasa hukum/pengacara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - c. pengurus SP/SB atau pengurus organisasi pengusaha (semua tingkatan);
 - d. konsultan hukum bidang hubungan industrial;
 - e. pengelola SDM di perusahaan/organisasi;
 - f. dosen/tenaga pengajar hubungan industrial;
 - g. anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) / Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)/Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial/Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
 - h. narasumber/pembicara seminar/lokarya/forum hubungan industrial lainnya.
9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak mengajukan mutasi sebelum masa jabatan 5 (lima) tahun;
10. tidak sedang menjabat sebagai:
 - a. anggota lembaga tinggi negara;
 - b. kepala daerah/kepala wilayah;
 - c. anggota lembaga legislatif tingkat pusat/daerah;
 - d. aparatur sipil negara;
 - e. anggota TNI/Polri;
 - f. pengurus partai politik;

- g. pengacara;
 - h. mediator/konsiliator/arbiter; atau
 - i. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha.
11. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

B. Lamaran dan Pendaftaran

1. Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial provinsi melalui:
 - a. Apindo, untuk pelamar dari unsur pengusaha;
 - b. Serikat Pekerja/Serikat, Buruh untuk pelamar dari unsur pekerja.
2. Lamaran dilampiri:
 - a. fotokopi akte kelahiran atau akte kenal lahir;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
 - e. surat berkelakuan baik dari kepolisian;
 - f. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sebanyak rangkap 2 (dua);
 - g. pas photo berwarna dan terbaru, berlatar belakang merah, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - h. dokumen tanda berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun;
 - i. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak mengajukan mutasi sebelum masa jabatan 5 (lima) tahun yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00;
 - j. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai: anggota lembaga tinggi negara, kepala daerah/wilayah, anggota legislatif tingkat pusat/daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pengurus partai politik, pengacara, mediator/konsiliator/arbiter, atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00; dan
 - k. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00.

C. Pelaksanaan Pendaftaran

1. Pendaftaran calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial ditujukan kepada Panitia Seleksi Daerah dengan alamat kantor/instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi sebagaimana lampiran I pengumuman ini.
2. Pengusulan pendaftaran calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dimulai pada tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 19 Oktober 2017 (10 hari kerja) pada jam kerja setempat.
3. Kebutuhan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilihat pada lampiran II pengumuman ini.

D. Proses Seleksi

1. Seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. tes tertulis.
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan menempati peringkat terbaik yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi berhak mengikuti tes tertulis.
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti pelatihan pra tugas yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

E. Ketentuan Lain-Lain

1. Form usulan organisasi dan data peserta dapat diperoleh di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi atau *website* Kementerian Ketenagakerjaan melalui laman: www.naker.go.id.
2. Seluruh persyaratan administrasi dimasukkan dalam amplop tertutup warna coklat polos dengan mencantumkan nomor telepon atau *handphone* pada sudut kanan atas surat permohonan maupun pada amplop surat.
3. Seleksi administrasi akan dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
4. Tes tertulis akan dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan diikuti oleh peserta dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan unsur APINDO berdasarkan pembobotan dan ranking penilaian berkas seleksi administrasi.
5. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi maupun tes tertulis dapat dilihat pada papan pengumuman Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan *website* Kementerian Ketenagakerjaan melalui laman www.naker.go.id
6. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi.
7. Berkas permohonan calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak akan dikembalikan dan menjadi dokumen Panitia Seleksi.
8. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun.
9. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Mataram, 05 Oktober 2017

Panitia Seleksi

Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan
Hubungan Industrial